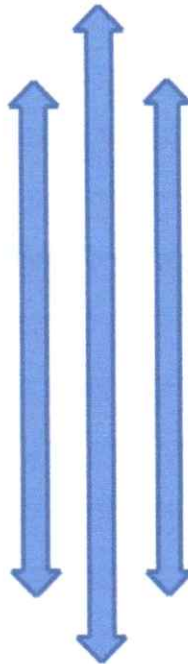




**KEPALA DESA NAWANGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA NAWANGSARI
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NAWANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**



**Ditetapkan :
HARI Rabu, 31 Desember 2025**

**DESA NAWANGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Gunung Muria No. 2
Kode Pos 51355



KEPALA DESA NAWANGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA NAWANGSARI
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAWANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAWANGSARI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nawangsari Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Nawangsari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Nawangsari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- c.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Keleurahan Merah Putih;
14. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Model Dokumen swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Keputusan Deputy I Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Model Dokumen Pengadaan Barang / Jasa di Desa melalui Penyedia;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang

Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
46. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024

Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

47. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
48. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
49. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
50. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
51. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
52. Surat Edaran Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK. 08/2025 dan Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 Tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
53. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
55. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
56. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2);
61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);
66. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
67. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);

71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 51);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 27);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 27);
79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 29);
80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 45);
81. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 400.10.2.4/1180/DISPERMASDES Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Pagu Indikatif Alokasi Dana Transfer bagi Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
82. Peraturan Desa Nawangsari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 sd 2028 di desa Nawangsari (Lembaran Desa Nawangsari Tahun 2023 Nomor 418) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nawangsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nawangsari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 sd 2030 (Lembaran Desa Nawangsari Tahun 2025 Nomor 434); dan
83. Peraturan Desa Nawangsari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 di desa Nawangsari (Lembaran Desa Nawangsari Tahun 2025 Nomor

- 441).
84. Peraturan Desa Nawangsari Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Nawangsari Tahun 2025 Nomor 451).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp 189.160.000,00 |
| b. Transfer | Rp 808.881.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp 998.041.000,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 647.923.795,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp 304.850.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 16.080.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 65.000.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | <u>Rp 74.550.000,00</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp 1.108.403.795,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | (Rp 110.362.795,00) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp 110.362.795,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp110.362.795,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Nawangsari

Ditetapkan di : Desa Nawangsari
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA NAWANGSARI



MUHAMMAD AINURROKHIM

Diundangkan di : Desa Nawangsari
Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA NAWANGSARI

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Zakky'.

MUHAMMAD ZAKKY TAUFIQILLAH

BERITA DESA NAWANGSARI TAHUN 2025 NOMOR 452

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NAWANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
		PENDAPATAN				
4.		Pendapatan Asli Desa			189.160.000,00	
4.1.		Hasil Usaha Desa			24.000.000,00	
4.1.1.		Bagi Hasil BUMDes			24.000.000,00	
4.1.1.01		Hasil Aset Desa			165.160.000,00	
4.1.2.		Pengelolaan Tanah Kas Desa			149.160.000,00	
4.1.2.01		Hasil Kios Milik Desa			16.000.000,00	
4.1.2.07		Pendapatan Transfer			809.381.000,00	
4.2.		Dana Desa			288.830.000,00	
4.2.1.		Dana Desa			288.830.000,00	
4.2.1.01		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			153.500.000,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			153.500.000,00	
4.2.2.01		Alokasi Dana Desa			267.051.000,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa			267.051.000,00	
4.2.3.01		Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00	
4.2.4.		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00	
4.2.4.01		Pendapatan Lain-lain			0,00	
4.3.		Bunga Bank			0,00	
4.3.6.		Bunga Bank			0,00	
4.3.6.01						
		JUMLAH PENDAPATAN			998.541.000,00	
		BELANJA				
5.						

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			648.423.795,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			494.595.982,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	42.780.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			42.780.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			42.780.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			34.500.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			8.280.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Tahun	178.100.500,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			178.100.500,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			178.100.500,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			143.876.500,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			34.224.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	tahun	12.022.713,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			12.022.713,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			12.022.713,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			1.937.511,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			10.085.202,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Tahun	54.816.702,00	ADD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.816.702,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.096.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			96.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.300.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			13.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.420.702,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.920.702,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			300.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tahun	33.418.217,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			33.418.217,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			33.418.217,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			32.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.90	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permasyarakatan Desa			1.018.217,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	3.547.850,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.547.850,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			97.850,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			97.850,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.450.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.450.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	Tahun	12.150.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.150.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			12.150.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			12.150.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	2	Paket	8.600.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.600.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.400.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.400.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	1	Tahun	42.000.000,00	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			42.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			42.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.90	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu			42.000.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	1	Paket	107.160.000,00	PAD
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			107.160.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			107.160.000,00	
1.01.92.	5.1.2.90	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Beng			107.160.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			100.000.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	100.000.000,00	PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			100.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			100.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			80.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			20.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			10.727.659,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Paket	3.000.000,00	PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			3.000.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Paket	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Lainnya Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1	Paket	3.000.000,00	ADD
1.03.02.	5.2.2.				3.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99				3.000.000,00	
1.03.03.	5.2.				160.000,00	
1.03.03.	5.2.1.				160.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01				160.000,00	
1.03.04.	5.2.				167.659,00	
1.03.04.	5.2.1.				167.659,00	
1.03.04.	5.2.1.05				167.659,00	
1.03.05.	5.2.				4.400.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	4.400.000,00				
1.03.05.	5.2.1.05	2.000.000,00				
1.03.05.	5.2.2.	2.000.000,00				
1.03.05.	5.2.2.05	2.400.000,00				
01.04.					43.100.154,00	
1.04.01.			1	Tahun	6.200.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.				6.200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.				1.200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05				200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06				1.000.000,00	
1.04.01.	5.2.3.				5.000.000,00	
1.04.01.	5.2.3.01				5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	5.000.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00	
1.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.500.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2	Paket	2.000.000,00	DDS
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	paket	992.093,00	DLL
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			992.093,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			992.093,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			992.093,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Paket	500.000,00	DDS
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	tahun	28.408.061,00	ADD, DDS, DLL
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.000.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			25.408.061,00	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			25.408.061,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
1.04.08.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			5.200.000,00	
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			20.208.061,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			304.850.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			48.800.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Paket	7.800.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.800.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.01.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.800.000,00	
2.01.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
2.01.01.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.000.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	tahun	1.000.000,00	DDS
2.01.08.	5.3.	Belanja Modal			1.000.000,00	
2.01.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.000.000,00	
2.01.08.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.000.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1	tahun	40.000.000,00	PAD
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			40.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			101.800.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Tahun	4.750.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.750.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.350.000,00	
2.02.01.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			750.000,00	
2.02.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.600.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
2.02.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1	Tahun	2.400.000,00	DDS
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)				
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa				
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				
2.02.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya				
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			1	
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				
2.02.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				
2.02.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan				
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Tahun	22.650.000,00	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				
2.02.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				
2.02.04.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan				
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.800.000,00	
2.02.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	5.400.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.400.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
2.02.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.400.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100.000.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1	Paket	100.000.000,00	PBP
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			100.000.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			100.000.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			20.000.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			80.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			54.250.000,00	
2.04.05.		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1	tahun	34.250.000,00	DDS
2.04.05.	5.3.	Belanja Modal			34.250.000,00	
2.04.05.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			34.250.000,00	
2.04.05.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			24.250.000,00	
2.04.05.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			10.000.000,00	
2.04.07.		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1	Paket	20.000.000,00	DDS
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
2.04.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
2.04.07.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			20.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			16.080.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			5.080.000,00	
3.01.04.		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1	Paket	5.080.000,00	DDS
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.080.000,00	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			80.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			80.000,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
3.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.01.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			4.800.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Tahun	4.800.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
3.03.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.800.000,00	
3.03.06.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			4.800.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			6.200.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	2 kegiatan	6.200.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.200.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			700.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			65.000.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			65.000.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Kegiatan	65.000.000,00	DDS, DLL
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			65.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			65.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			60.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			5.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			74.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			42.150.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana			42.150.000,00	
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1	tahun	42.150.000,00	DLL
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			42.150.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			42.150.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			32.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Tahun	32.400.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			32.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			32.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.108.903.795,00	
		SURPLUS DEFISIT			(110.362.795,00)	
6.		PEMBIAYAAN			110.362.795,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			27.220.702,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			27.220.702,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			83.142.093,00	
6.1.9.		Penerimaan Pembiayaan Lainnya			83.142.093,00	
6.1.9.99		Penerimaan Pembiayaan Lainnya			110.362.795,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			0,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				

